

Penganggaran Daerah yang Transparan: Meningkatkan Akuntabilitas dan Partisipasi

Indana Zahratul Auliya¹, Maesarah², Jumadi³, Aprilia Maulida⁴, Lila Alwyah⁵

^{1,2,3,4,5} Akademi Bisnis Lombok
E-mail: indanaauliya05@gmail.com

Abstract:

Regional budget transparency constitutes a fundamental pillar of good governance in enhancing accountability and public participation. Within the framework of Indonesia's regional autonomy, local government budgets (APBD) are required to be managed in a transparent, participatory, and accountable manner to gain public legitimacy. This study aims to comprehensively examine the concept, implementation, and impact of transparent budgeting on accountability and public engagement. A qualitative method using a literature review approach was employed by analyzing accredited national journals, conference proceedings, and relevant scholarly sources. The literature review indicates that transparency in regional budgeting plays a vital role in strengthening fiscal accountability and stimulating citizen participation. By providing open access to budget information, public oversight can be conducted more effectively, thereby minimizing the potential for misappropriation of funds. Public participation has been shown to enhance the legitimacy of budgetary policies, although its effectiveness largely depends on the availability of adequate data and the level of public awareness regarding budget policies. Furthermore, the competence of local government officials is a key factor in supporting transparency and accountability in budget management. Therefore, synergy between budget transparency, citizen participation, and capacity building of government officials is an essential prerequisite for achieving accountable and sustainable regional financial management. Accordingly, strengthening regulatory frameworks, utilizing information technology, and enhancing the capacity of government officials are necessary to ensure sustainable transparent and participatory regional budgeting.

Keywords: *Accountability, Budget Transparency, Governance, Public Participation, Regional Budgeting.*

Abstrak:

Transparansi penganggaran daerah merupakan fondasi utama tata kelola pemerintahan yang baik untuk meningkatkan akuntabilitas dan partisipasi masyarakat. Dalam kerangka otonomi daerah Indonesia, APBD dituntut dikelola secara transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab guna memperoleh legitimasi publik. Penelitian ini bertujuan mengkaji secara komprehensif konsep, implementasi, serta dampak penganggaran transparan pada akuntabilitas dan keterlibatan publik. Metode kualitatif melalui *literature review* diterapkan dengan mengkaji jurnal nasional berakreditasi, prosiding konferensi, dan sumber ilmiah terkait. Berdasarkan kajian literatur, keterbukaan penganggaran daerah memiliki peran vital dalam meningkatkan pertanggungjawaban fiskal dan merangsang partisipasi warga. Dengan membuka akses atas informasi anggaran, pengawasan masyarakat dapat dilakukan lebih efektif,

sehingga potensi penyelewengan diminimalkan. Partisipasi warga terbukti mampu menambah legitimasi pada kebijakan anggaran, walaupun dampaknya sangat ditentukan oleh ketersediaan data yang memadai dan tingkat kesadaran publik mengenai kebijakan tersebut. Selain itu, kemampuan aparatur pemerintah daerah merupakan faktor utama yang mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan anggaran. Dengan demikian, kerja sama antara transparansi penganggaran, partisipasi warga, dan pengembangan kemampuan aparatur menjadi prasyarat esensial untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan lestari. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, pemanfaatan teknologi informasi, dan peningkatan kapasitas aparatur untuk mewujudkan penganggaran daerah yang transparan dan partisipatif secara berkelanjutan.

Kata kunci: Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Penganggaran Daerah, Tata Kelola Pemerintahan, Transparansi Anggaran

A. Pendahuluan

Pengelolaan dana publik menjadi salah satu elemen krusial dalam pelaksanaan pemerintahan yang demokratis serta akuntabel, khususnya di masa desentralisasi keuangan yang memberikan wewenang besar kepada pemerintah lokal untuk menangani aset finansialnya (Wijayanto, 2015). Di bawah kondisi tersebut, anggaran regional tidak sekadar berperan sebagai mekanisme fiskal, melainkan juga sebagai instrumen strategi publik yang menggambarkan fokus perkembangan dan dedikasi pemerintah pada kemakmuran rakyat.

Sejalan dengan naiknya permintaan warga atas keterbukaan data umum, transparansi penganggaran lokal berkembang menjadi masalah kunci untuk merealisasikan praktik pemerintahan yang unggul (*good governance*) (Sari, Mulyani, & Budiarto, 2020). Transparansi ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengikuti alur perencanaan, alokasi, dan implementasi anggaran, yang akhirnya memungkinkan pengawasan publik yang lebih tangguh.

Transparansi anggaran adalah prinsip utama dalam pengelolaan keuangan publik yang menyoroti komitmen pemerintah untuk memberikan data anggaran kepada masyarakat dengan cara yang ringkas, tepat, dan dapat dijangkau dengan mudah. Prinsip ini meliputi semua fase penganggaran, dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan dan pelaporan akhir, sehingga masyarakat dapat memahami serta mengevaluasi pemanfaatan dana keuangan daerah (Wijayanto, 2015; Achmad et al., 2020).

Selain itu, transparansi anggaran dikenali sebagai sarana penting untuk merealisasikan akuntabilitas publik, mengingat keterbukaan data anggaran memungkinkan masyarakat dan lembaga pengawas melakukan pengawasan atas efektivitas pemerintah daerah (Edowati et al., 2021; Silvia, 2024). Transparansi ini juga berperan dalam menerapkan prinsip tata pemerintahan yang baik dengan memacu integritas, efisiensi, dan pencegahan penyimpangan dalam penanganan APBD (Pebrianti, 2021; Silvia & Myrna, 2024). Akibatnya, transparansi anggaran bukan semata-mata aspek administratif, melainkan elemen strategis untuk membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah (Lathifah et al., 2024; Mauni, 2025).

Di luar aspek transparansi, akuntabilitas merupakan elemen krusial dalam penanganan keuangan regional, sebab ia melibatkan tanggung jawab pemerintah daerah untuk memberikan laporan atas pemanfaatan dana negara kepada warga dan instansi pengontrol (Edowati, Abubakar, & Said, 2021). Tingkat akuntabilitas keuangan daerah

yang minim dapat memicu deviasi anggaran, pemborosan pengeluaran, serta erosi kepercayaan masyarakat pada otoritas lokal.

Peran aktif masyarakat menjadi faktor penting dalam tahapan penganggaran lokal, khususnya lewat forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang bertujuan menangkap aspirasi dan keperluan publik secara langsung (Nurhaeda & Tenriola, 2022). Keterlibatan yang bermutu dapat meningkatkan kesesuaian kegiatan dengan kebutuhan nyata masyarakat, serta mendukung mekanisme kontrol sosial atas pemanfaatan anggaran.

Partisipasi masyarakat dalam penganggaran daerah adalah keterlibatan aktif warga dalam proses penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran publik. Partisipasi ini mencerminkan hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kebutuhan, dan kepentingannya dalam pengambilan keputusan kebijakan anggaran (Nurhaeda & Tenriola, 2022; Sungkar, 2023).

Keterlibatan masyarakat dianggap sebagai komponen kunci untuk meneguhkan validitas kebijakan anggaran, sebab kebijakan yang lahir dari partisipasi publik biasanya lebih adaptif dengan aspirasi riil masyarakat (Sari et al., 2020; Tarima & Jamaluddin, 2022). Lebih lanjut, partisipasi masyarakat juga bertindak sebagai instrumen kontrol sosial yang mampu meningkatkan pertanggungjawaban dalam penanganan keuangan daerah serta membatasi risiko penyimpangan dana (Aurelia et al., 2023; Yurika et al., 2024). Walaupun sejumlah peraturan telah memajukan keterbukaan dan keterlibatan dalam penyusunan anggaran regional, realitas di tingkat praktis mengungkapkan bahwa pelaksanaannya masih dihadapkan pada berbagai hambatan, termasuk kurangnya ketersediaan data, tingkat pemahaman masyarakat tentang anggaran yang masih rendah, serta kemampuan pegawai pemerintah yang belum seragam (Lathifah et al., 2024). Dengan demikian, diperlukan tinjauan pustaka yang mendalam untuk menilai seberapa besar peran transparansi penganggaran daerah dalam meningkatkan pertanggungjawaban dan partisipasi publik.

B. Tinjauan Pustaka

Penganggaran Daerah

Penganggaran daerah adalah kegiatan perencanaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah setempat untuk mendistribusikan dana publik secara teratur, dengan tujuan mewujudkan sasaran pembangunan wilayah dan meningkatkan kemakmuran masyarakat (Wijayanto, 2015). Dalam konteks desentralisasi daerah, penganggaran berfungsi sebagai alat penting yang menunjukkan prioritas program serta dedikasi pemerintah daerah pada layanan masyarakat dan pembangunan yang lestari.

Proses penyusunan anggaran daerah terdiri dari tahapan utama, yakni perencanaan, pembahasan dan penetapan, eksekusi, serta akuntabilitas anggaran yang dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tahapan-tahapan ini saling bergantung dan harus diterapkan secara berkelanjutan supaya anggaran mampu berfungsi optimal sebagai instrumen pengawasan dan penilaian capaian pemerintah daerah (Wijayanto, 2015).

Di samping itu, penganggaran daerah berfungsi sebagai alat koordinasi antara pemerintah setempat dan pemangku kepentingan lainnya, seperti masyarakat dan badan legislatif. Oleh sebab itu, kualitas penganggaran sangat ditentukan oleh sejauh mana prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi diterapkan secara komprehensif di semua langkah pengelolaan anggaran (Sari et al., 2020).

Transparansi Anggaran

Transparansi anggaran merujuk pada keterbukaan yang ditunjukkan pemerintah daerah dalam menyampaikan data yang akurat, jelas, dan dapat dijangkau dengan mudah oleh masyarakat seputar tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan laporan anggaran wilayah (Sari et al., 2020). Ini merupakan aspek krusial untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, karena memfasilitasi pemahaman publik tentang cara dana publik direncanakan dan digunakan.

Penerapan transparansi dalam anggaran memberikan kesempatan kepada publik untuk memantau penggunaan dana dan menilai capaian pemerintah daerah secara adil. Melalui transparansi tersebut, kemungkinan penyelewengan anggaran dan praktik korupsi dapat ditekan, karena setiap langkah kebijakan anggaran diawasi oleh masyarakat (Edowati et al., 2021).

Terdapat dua aspek utama yang menjelaskan dampak transparansi anggaran ini. Pertama, melalui transparansi anggaran, masyarakat mendapatkan akses informasi terkait rencana dan realisasi anggaran daerah. Masyarakat dapat lebih mudah melakukan pengawasan jika mereka memiliki informasi selengkap mungkin mengenai anggaran yang tersedia, termasuk bagaimana dana tersebut dialokasikan dan digunakan. Kedua, transparansi anggaran memberikan tekanan kepada pemerintah daerah untuk lebih berhati-hati dalam pengelolaan keuangan, sebab setiap tindakan dalam penggunaan dana publik dapat diawasi oleh publik.

Meskipun demikian, transparansi anggaran tidak berhenti pada sekadar penerbitan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), melainkan juga melibatkan kualitas data yang disediakan. Data tersebut harus disampaikan tepat waktu, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan warga agar transparansi dapat berjalan dengan maksimal (Lathifah et al., 2024).

Akuntabilitas Keuangan Daerah

Akuntabilitas dalam keuangan daerah merujuk pada tugas pemerintah wilayah untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana kepada masyarakat dan instansi pengawas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Edowati et al., 2021). Ini mencerminkan kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya publik dengan efisiensi, efektivitas, dan rasa tanggung jawab yang tinggi.

Akuntabilitas keuangan daerah meliputi tiga aspek pokok, yakni akuntabilitas administratif, akuntabilitas hukum, serta akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas administratif menyangkut ketaatan pada tata cara dan peraturan yang berlaku, sedangkan akuntabilitas kinerja lebih menyoroti pencapaian sasaran serta capaian program sesuai rencana anggaran (Achmad et al., 2020).

Penelitian sebelumnya membuktikan bahwa transparansi anggaran berhubungan positif dengan tingkat akuntabilitas keuangan daerah. Keterbukaan informasi anggaran oleh pemerintah daerah yang semakin tinggi akan memperbesar kesempatan masyarakat dan pengawas eksternal untuk mengaudit kinerja pengelolaan keuangan tersebut (Sari et al., 2020; Edowati et al., 2021).

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat pada penganggaran daerah mengacu pada keterlibatan langsung warga dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan anggaran daerah. Keterlibatan ini dimaksudkan agar kebijakan anggaran pemerintah daerah selaras dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat (Achmad et al., 2020).

Secara umum, partisipasi masyarakat pada penganggaran daerah diimplementasikan melalui instrumen resmi seperti musrenbang, konsultasi publik, dan penyampaian masukan melalui perwakilan rakyat daerah. Efektivitas partisipasi ini dapat mempertegas legitimasi anggaran serta akuntabilitas pemerintah daerah kepada publik (Nurhaeda & Tenriola, 2022).

Dengan terlibatnya masyarakat dalam pengawasan anggaran, transparansi dapat meningkat karena masyarakat yang terlibat cenderung lebih kritis dalam setiap penggunaan anggaran yang tidak sejalan dengan rencana. Mereka juga dapat menyalurkan *feedback* atau melaporkan penyalahgunaan anggaran yang pada akhirnya meningkatkan efektivitas pengawasan.

Meski demikian, riset-riset terbaru menunjukkan partisipasi masyarakat dalam penganggaran daerah kerap terhambat oleh lemahnya literasi keuangan publik dan terbatasnya akses data. Dengan demikian, upaya membangun kapasitas masyarakat serta menyajikan informasi anggaran secara transparan dan mudah diakses sangat dibutuhkan untuk menjadikan partisipasi tersebut lebih esensial dan berkelanjutan (Lathifah et al., 2024).

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *literature review*. Data dikumpulkan melalui penelusuran dan penelaahan jurnal nasional, prosiding ilmiah, serta publikasi akademik yang relevan dengan topik transparansi penganggaran daerah, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat (Triandini et al, 2019).

Literatur yang dikaji diseleksi sesuai standar kecocokan tema, kualitas sumber, dan jangkauan waktu publikasi. Teknik pengolahan data melibatkan pengkategorian hasil penelitian berdasarkan tema utama, lalu disatukan untuk membentuk inferensi konseptual yang komprehensif (Pebrianti, 2021).

D. Hasil

Dari hasil penelaahan mendalam atas berbagai publikasi penelitian yang relevan, terungkap bahwa variabel transparansi anggaran, pelibatan masyarakat dalam proses penganggaran, dan kompetensi aparatur pemerintahan memiliki keterhubungan yang kuat dan signifikan dengan peningkatan tingkat akuntabilitas keuangan daerah. Temuan ini menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel tidak hanya ditentukan oleh keberlakuan aturan dan regulasi formal, tetapi juga oleh sejauh mana prinsip transparansi dioperasionalkan dan sejauh mana masyarakat diberi kesempatan untuk terlibat secara aktif dalam proses penyusunan dan pengawasan anggaran (Tarima & Jamaluddin, 2022).

Transparansi anggaran secara berulang kali terbukti sebagai elemen utama yang terkait erat dengan akuntabilitas keuangan daerah dalam berbagai studi. Dengan menyediakan keterbukaan penuh akan informasi mengenai tahap perencanaan, pembagian alokasi, serta pelaksanaan anggaran, hal ini memfasilitasi masyarakat dan lembaga pengawas eksternal untuk melaksanakan pengawasan yang lebih efektif dan mendalam, yang pada akhirnya mendorong pemerintah daerah agar lebih bertanggung jawab dalam mengelola serta memanfaatkan dana publik (Sari et al., 2020; Edowati et al., 2021).

Selain aspek transparansi, elemen partisipasi masyarakat juga berperan penting dalam perbaikan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses penganggaran melalui mekanisme formal seperti forum diskusi atau pengawasan sosial dari tingkat bawah publik memperoleh

ruang untuk menyampaikan masukan aspiratif mereka dan melakukan pengawasan atas implementasi kebijakan anggaran. Partisipasi yang benar-benar aktif dapat menghasilkan keselarasan yang lebih baik antara inisiatif program dan kegiatan pemerintah daerah dengan kebutuhan serta ekspektasi masyarakat secara luas (Nurhaeda & Tenriola, 2022).

Keterbukaan informasi anggaran juga berperan sebagai sarana edukasi untuk masyarakat. Apabila masyarakat memiliki pemahaman yang baik tentang anggaran yang disusun oleh pemerintah daerah, mereka dapat memberikan masukan atau kritik konstruktif yang lebih efektif pada pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, transparansi anggaran dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah daerah, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas keuangan daerah.

Selain faktor-faktor sebelumnya, kemampuan atau kompetensi aparatur pemerintah daerah juga menjadi penentu penting dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah secara keseluruhan. Aparatur yang dibekali dengan wawasan yang memadai tentang pengelolaan aset keuangan publik, regulasi yang mengatur anggaran, dan standar etika pemerintahan mampu melaksanakan tugas-tugas penganggaran dengan profesionalisme yang unggul serta komitmen tanggung jawab yang tinggi. Tingkat kompetensi aparatur ini berfungsi sebagai prasyarat krusial untuk menjamin bahwa penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem anggaran dapat berjalan dengan efisiensi dan efektivitas yang diharapkan (Lathifah et al., 2024).

Tabel 1. Ringkasan Temuan Penelitian Terdahulu

Penulis	Tahun	Fokus Penelitian	Temuan Utama
Sari et al.	2020	Transparansi anggaran	Transparansi terkait dengan peningkatan akuntabilitas
Edowati et al.	2021	Akuntabilitas keuangan	Transparansi meningkatkan kepercayaan publik
Nurhaeda & Tenriola	2022	Partisipasi masyarakat	Partisipasi meningkatkan kontrol sosial
Lathifah et al.	2024	Tata kelola keuangan	Kompetensi aparatur memengaruhi akuntabilitas
Yurika et al.	2024	Pengawasan publik	Transparansi memudahkan pengawasan

E. Pembahasan

Dari kajian literatur yang telah dirangkum, jelas bahwa transparansi penganggaran daerah berfungsi sebagai elemen prasyarat paling krusial untuk mengoptimalkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Ketersediaan informasi anggaran yang terbuka lebar memberikan akses bagi masyarakat dan badan pengawas untuk melakukan penilaian yang obyektif atas capaian kinerja pemerintah daerah, yang akhirnya mendorong munculnya pola pengelolaan keuangan yang lebih akuntabel dan penuh pertanggungjawaban (Sari et al., 2020). Kesimpulan ini didukung sepenuhnya oleh pandangan Edowati et al. (2021), yang menegaskan bahwa

peningkatan transparansi anggaran berkontribusi positif dalam membangun kepercayaan publik pada pemerintah daerah secara berkelanjutan.

Keterlibatan masyarakat dalam proses penganggaran daerah turut memberikan kontribusi yang sangat berarti pada perbaikan kualitas kebijakan anggaran secara keseluruhan. Dengan adanya partisipasi yang aktif dari publik, aspirasi serta kebutuhan riil masyarakat dapat diintegrasikan secara lebih baik ke dalam tahap perencanaan anggaran, sehingga menghasilkan kebijakan-kebijakan yang lebih peka pada dinamika sosial dan benar-benar berfokus pada kepentingan umum (Achmad et al., 2020). Meskipun demikian, sejumlah studi menyoroti bahwa praktik partisipasi masyarakat kerap kali masih terjebak dalam ranah prosedural semata dan bersifat formal belaka, yang menyebabkan hasilnya dalam peningkatan akuntabilitas belum mencapai tingkat optimal seperti yang diharapkan (Silvia & Myrna, 2024).

Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pengawasan, dan evaluasi anggaran daerah berkontribusi signifikan dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah. Partisipasi masyarakat berfungsi sebagai kontrol sosial yang mengurangi peluang untuk terjadi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan pandangan Agrawal dan Ribot (1999:47), setiap model akuntabilitas menggambarkan hubungan timbal balik. Penemuan ini sepenuhnya selaras dengan prinsip akuntabilitas. Di atas permukaan ada aktor (Pemerintah) dan legislator (masyarakat). Untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah, masyarakat harus menuntut pertanggungjawaban. Akibatnya, inisiatif desentralisasi menjadi lebih terprediksi (Aurelia et al., 2023).

Di luar aspek transparansi dan partisipasi masyarakat, kualitas kompetensi aparatur pemerintah daerah juga merupakan elemen pendukung esensial yang tidak boleh dianggap remeh dalam rangka menciptakan sistem penganggaran daerah yang benar-benar akuntabel. Pegawai pemerintah daerah yang memiliki kompetensi tinggi mampu merancang, mengimplementasikan, serta mempertanggungjawabkan anggaran dengan mematuhi prinsip-prinsip efisiensi penggunaan sumber daya, efektivitas pencapaian tujuan, dan kepatuhan penuh pada peraturan yang berlaku. Dengan demikian, upaya peningkatan kapasitas aparatur melalui program pelatihan berkelanjutan dan pengembangan keterampilan profesional menjadi strategi utama yang sangat relevan untuk memperkokoh tata kelola keuangan daerah secara berkesinambungan (Lathifah et al., 2024).

Secara menyeluruh, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa transparansi penganggaran, keterlibatan partisipasi masyarakat, serta kualitas kompetensi aparatur pemerintah daerah membentuk tiga pilar utama yang saling melengkapi dan bergantung satu sama lain dalam upaya menciptakan akuntabilitas keuangan daerah yang solid. Apabila transparansi tidak mencapai tingkat yang memadai, maka partisipasi publik akan kesulitan untuk terealisasi secara efektif, dan tanpa dukungan aparatur yang memiliki kompetensi tinggi, penerapan prinsip-prinsip penganggaran yang baik tidak akan dapat dijalankan dengan tingkat optimal yang diharapkan (Tarima & Jamaluddin, 2022).

Di luar faktor-faktor pokok yang telah disebutkan sebelumnya, kerangka kelembagaan serta tingkat komitmen dari pimpinan daerah juga memainkan peran yang sangat strategis dalam menentukan sejauh mana transparansi dan akuntabilitas anggaran dapat diterapkan secara efektif dan berkelanjutan. Ketika pimpinan daerah memberikan dukungan yang tegas pada prinsip keterbukaan informasi serta pelibatan partisipasi publik, hal ini akan memotivasi aparatur untuk lebih konsisten mematuhi

standar-standar tata kelola keuangan yang baik dan bertanggung jawab. Sebaliknya, tanpa adanya komitmen kepemimpinan yang kuat seperti ini, upaya transparansi dan partisipasi masyarakat berisiko hanya menjadi prosedur administratif formal semata tanpa mampu menghasilkan perubahan nyata dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah (Edowati et al., 2021; Tarima & Jamaluddin, 2022).

Disamping itu, aspek dinamika sosial serta kemampuan literasi anggaran masyarakat juga berperan penting dalam menentukan kualitas partisipasi publik yang terlibat dalam proses penganggaran daerah secara keseluruhan. Masyarakat dengan tingkat pemahaman yang baik mengenai isu-isu anggaran daerah umumnya lebih siap untuk menyampaikan saran-saran yang konstruktif dan bernuansa kritis, serta menjalankan fungsi pengawasan yang lebih presisi dan berdaya guna. Karenanya, inisiatif peningkatan akuntabilitas keuangan daerah tidak hanya menjadi kewajiban eksklusif bagi pemerintah daerah, tetapi juga menuntut strategi pengabdian pendidikan publik yang berkelanjutan agar transparansi informasi yang telah diwujudkan dapat dimanfaatkan secara paling efektif dan strategis oleh warga masyarakat (Yurika et al., 2024; Silvia & Myrna, 2024).

F. Kesimpulan

Berdasarkan kajian komprehensif dari tinjauan literatur yang mencakup berbagai studi penelitian sebelumnya, dapat dirangkum bahwa bahwa transparansi penganggaran daerah berperan strategis dalam meningkatkan keabsahan akuntabilitas keuangan daerah dan merangsang partisipasi masyarakat. Keterbukaan informasi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran memungkinkan pengawasan publik yang lebih efektif oleh masyarakat dan lembaga pengawas, sehingga meminimalkan risiko penyimpangan dana

Disamping itu, keterlibatan partisipasi masyarakat dalam proses penganggaran daerah secara empiris terbukti mampu meningkatkan tingkat legitimasi kebijakan anggaran yang dihasilkan oleh pemerintah daerah. Pelibatan publik ini tidak hanya memperkaya dimensi demokratis dalam mekanisme pengambilan keputusan publik secara keseluruhan, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial yang efektif untuk memotivasi pemerintah daerah agar lebih peka dan adaptif pada aspirasi serta kebutuhan nyata masyarakat. Meskipun begitu, tingkat keberhasilan partisipasi tersebut sangat ditentukan oleh ketersediaan akses informasi transparan yang memadai serta kemampuan masyarakat dalam menginterpretasikan dan memahami kompleksitas kebijakan anggaran dengan baik.

Aspek lain yang patut diperhatikan adalah kompetensi aparatur pemerintah daerah, yang berfungsi sebagai pilar pendukung vital dalam upaya merealisasikan transparansi serta akuntabilitas dalam penganggaran daerah. Aparatur yang memiliki kapabilitas teknis yang handal, wawasan regulasi yang luas, dan sikap integritas yang terjaga dengan baik mampu melaksanakan pengelolaan anggaran dengan tingkat profesionalisme tinggi dan komitmen pertanggungjawaban yang konsisten. Dengan demikian, inisiatif peningkatan kapasitas bagi aparatur harus menjadi agenda prioritas yang berkelanjutan, meliputi program pelatihan intensif, optimalisasi sistem pendukung, dan pembudayaan pola kerja yang berlandaskan pada tata kelola pemerintahan yang berkualitas.

Dengan begitu, kolaborasi sinergis di antara transparansi penganggaran, partisipasi aktif masyarakat, serta peningkatan kualitas kompetensi aparatur muncul sebagai kunci sentral dalam merealisasikan tata kelola keuangan daerah yang

akuntabel, berbasis partisipasi, dan mampu bertahan lama. Diperlukan agar pemerintah daerah menjadikan elemen-elemen tersebut sebagai prinsip panduan utama dalam penyusunan dan eksekusi kebijakan anggaran, guna meningkatkan rasa percaya publik serta kualitas pengelolaan keuangan daerah secara holistik.

Daftar Pustaka

- Achmad, J., Saleh, H., & Chahyono, C. (2020). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah. *Indonesian Journal of Business and Management*, 2(2), 105–111.
- Aurelia, D., Sudirman, R., & Hapid, H. (2023). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 7(1), 25.
<https://doi.org/10.25273/inventory.v7i1.16183>
- Edowati, M., Abubakar, H., & Said, M. (2021). Transparansi anggaran dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 4(1).
<https://doi.org/10.35965/jbm.v4i1.1184>
- Lathifah, H., Frinaldi, A., Asnil, A., & Putri, N. E. (2024). Komunikasi publik dalam mewujudkan transparansi pengelolaan anggaran daerah. *Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik*, 11(2), 585–592.
- Mauni, C. (2025). Akuntabilitas publik dalam pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 3(1), 104–115.
- Nurhaeda, A., & Tenriola, A. (2022). Partisipasi masyarakat dalam penganggaran daerah. *Tangible Journal*, 7(2). <https://doi.org/10.53654/tangible.v7i2.304>
- Pebrianti, G. M. (2021). *Transparansi anggaran daerah dan good governance*. STIE PGRI Dewantara Jombang.
- Prosiding Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. (2025). *Transparansi dan partisipasi dalam pengelolaan keuangan daerah*.
- Ratna Purnama Sari, Mulyani, C. S., & Budiarto, D. S. (2020). *Penganggaran daerah yang transparan*. Universitas PGRI Yogyakarta.
- Sari, R. P., Mulyani, C. S., & Budiarto, D. S. (2020). Penganggaran daerah yang transparan: Meningkatkan akuntabilitas dan partisipasi. *Jurnal Riset Akuntansi dan Manajemen Bisnis*, 6(1). <https://doi.org/10.26486/jramb.v6i1.697>
- Silvia, A. N. (2024). Transparansi keuangan daerah sebagai instrumen akuntabilitas publik. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 8(1).
- Silvia, A. N., & Myrna, R. (2024). Transparansi APBD dan akuntabilitas publik dalam pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 8(1).
- Sungkar, A. A. (2023). Penganggaran publik dan partisipasi masyarakat. *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 3(3), 200–206.
- Tarima, V. R., & Jamaluddin, M. D. (2022). Transparansi dan partisipasi publik dalam pengelolaan APBD. *AKUNTABEL: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 19(3), 682–693.
- Wijayanto, H. (2015). Transparansi penganggaran daerah dalam perspektif administrasi publik. *The Indonesian Journal of Public Administration*, 1(1), 72–88.
- Yurika, A., Hasibuan, D. S. B., Waruwu, H., Gulo, P. D., & Nurhaliza, S. (2024). Partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran publik. *Journal of Student Research*, 2(2), 79–86.